

ABSTRAK

Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang dialokasikan melalui APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan desa. Besarnya alokasi Dana Desa menuntun pengelolaan yang akuntabel dan pengawas yang efektif guna mencegah potensi penyalahgunaan. Untuk memperkuat pengendalian tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian, penggunaa, dan penyaluran dana desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan perlunya penguatan penyaluran Dana Desa dalam konteks tata kelola fiskal dan dukungan terhadap prioritas nasional, serta mengkaji pengaturan dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025 sebagai instrumen pencegahan penyelewengan Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa dan PMK Nomor 81 Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan penyaluran Dana Desa merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai bagian dari keuangan negara sekaligus instrumen pendukung prioritas pembangunan nasional. PMK Nomor 81 Tahun 2025 menerapkan mekanisme preventive control melalui pengetatan persyaratan penyaluran, pelaporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran, integrasi sistem elektronik OM-SPAN TKD, serta sanksi administratif. Pengaturan tersebut pada dasarnya selaras dengan kewenangan Menteri Keuangan dan mendukung akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, namun tetap harus diterapkan secara proporsional agar tidak mengurangi otonomi desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Tata Kelola Fiskal, Pencegahan Korupsi, Otonomi Desa, PMK Nomor 81 Tahun 2025.

ABSTRACT

Village Funds constitute part of state finances allocated through the State Budget (APBN) to support village governance, development, community empowerment, and the improvement of rural welfare. The increasing allocation of Village Funds requires accountable management and effective supervision to prevent potential misuse. To strengthen such control, the government enacted Minister of Finance Regulation Number 81 of 2025 as an amendment to Minister of Finance Regulation Number 108 of 2024 concerning the allocation, utilization, and distribution of Village Funds for Fiscal Year 2025. This study aims to analyze the necessity of strengthening Village Fund distribution within the framework of fiscal governance and national development priorities, as well as to examine the regulatory framework of Minister of Finance Regulation Number 81 of 2025 as a preventive instrument against Village Fund misappropriation.

This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, namely Law Number 3 of 2024 concerning Villages and Minister of Finance Regulation Number 81 of 2025, as well as secondary legal materials including literature, scientific journals, and legal doctrines. The analysis is conducted using a qualitative normative approach.

The results indicate that strengthening Village Fund distribution is a logical consequence of its status as part of state finances and as an instrument supporting national development priorities. Minister of Finance Regulation Number 81 of 2025 adopts a preventive control mechanism through stricter distribution requirements, reporting obligations on budget absorption and output achievements, integration of the OM-SPAN TKD electronic system, and administrative sanctions. The regulation is generally consistent with the authority of the Minister of Finance and supports accountability in Village Fund management, provided that its implementation remains proportional and does not undermine village autonomy.

Keywords: Village Funds, Fiscal Governance, Corruption Prevention, Village Autonomy, Minister of Finance Regulation Number 81 of 2025.